

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**Oleh**  
Gustriyani Isi Perwitasari

### ***Abstract***

*Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Daerah No 7 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi menurut George C Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi*

*Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Departemen Perdagangan, Perburuhan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan dengan data reduksi, presentasi data dan kesimpulan*

**Keyword:** *Komunikasi, Sikap, Sumber Daya, Struktur Birokrasi*

---

### **Pendahuluan**

Pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, permasalahan yang ditimbulkan antara lain jumlah pedagang kaki lima yang tidak terkontrol dan terlanjur menjamur, Banyak fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang publik yang rusak atau hilang karena digunakan oleh pedagang kaki lima, Terjadi kesemrawutan dan ke-macetan lalu lintas di kawasan pedagang kaki lima, Timbulnya kekumuhan kota, Timbulnya permasalahan kebersihan, sosial, ekonomi, ketertiban dan keamanan., Meningkatnya tindak kriminalitas, Menghilangkan akses pengguna pejalan kaki. Permasalahan diatas mendorong Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah dan pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak.

Potensi yang ada di pedagang kaki lima untuk berjualan merupakan potensi perdagangan bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk mendukung salah satu misi Bupati Kabupaten Karanganyar yaitu menciptakan wirausahawan mandiri sebagai penentu kebijakan tentunya pemerintah lebih bijak dalam mengelola permasalahan pedagang kaki lima. Semakin kompleknya perkembangan kota yang salah satu di antaranya adalah perkembangan pedagang kaki lima dengan segala bentuk dan jenis

usahanya, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang terarah dan berkesinambungan.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih saja banyak pedagang kaki lima di daerah Karanganyar yang akhirnya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang meng-ganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pembangunan pasar di berbagai daerah Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dapat menampung para pedagang kaki lima agar dapat berdagang ditempat yang layak. Contohnya pasar yang berada di Pasar Jungke maupun pasar-pasar di daerah Kabupaten Karanganyar, meskipun sudah dibangun pasar akan tetapi pasar tersebut belum sepenuhnya dapat menampung semua pedagang kaki lima. Akibatnya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di luar sekitar pasar. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu lalu lintas baik.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian des-kriptif sedangkan pendekatan penelitian ini

menggunakan pe-nelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Tempat Penelitian di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar maka penulis menyimpulkan bahwa ko-munikasi yang ada antara dinas atau instansi yang terkait dengan program ini sudah berjalan dengan baik. Semua pihak yang terkait dilibatkan dan selalu diajak untuk menentukan kebijakan yang diambil. Selalu terjadi komunikasi melalui per-temuan-pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pertemuan dilakukan secara rutin oleh tim gabungan baik sebelum program dilaksanakan mau-pun setelah program dilaksanakan. Bupati Karanganyar juga mampu mengkoordinir bawahannya dengan baik, sehingga pembagian tugas antar agen pelaksana dapat jelas diterima oleh para agen pelaksana. Rapat-rapat selalu dilakukan apabila menjelang hari pelaksanaan pe-nertiban (relokasi) dan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Komunikasi juga dilakukan untuk merespon aspirasi dari pedagang kaki lima, rapat dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Setiap ada kritik dari pedagang kaki lima, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam program ini untuk bersama-sama membahas untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Setiap ada kritik dari pedagang kaki lima pemerintah mengadakan rapat untuk mem-bahasnya dengan semua tim yang terlibat dalam program ini. Setelah pemerintah mendapatkan jalan keluar atas aspirasi dari pedagang kaki lima maka perwakilan dari pedagang kaki lima di undang untuk membahas bersama, sehingga diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang terbaik dari kedua belah pihak.

Sikap adalah suatu pandangan, orientasi dan nilai-nilai yang diyakini dan dianut baik oleh kelompok sasaran

kebijakan pe-nataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maupun oleh agen pelaksana, serta tindakan dan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai implementasi dan nilai-nilai atau yang dianutnya tersebut. Perubahan-perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok-ke-lompok masyarakat terhadap tujuan dari out put kebijakan memainkan peranan yang cukup penting dalam proses implementasi.

Sumber daya manusia dapat diukur dari jumlah personil dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pihak yang diserahi tugas dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya mencukupi dan tersedia sangat dibutuhkan akan dapat mendukung implemntasi kebijakan. Namun yang terjadi di lapangan, jumlah personil yang ada di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karang-anyar masih kurang atau tidak dapat memenuhi dan sesuai untuk menangani pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar. Hal ini jika di lihat dari dari jumlah pedagang kaki lima yang ada sekarang 550 orang maka tidak terjadi keseimbangan, maka untuk itu diperlukan penambahan personil dalam penarikan redistribusi sehingga akan berjalan dengan efektif.

Pada hal ini mencakup dua faktor yaitu SOP dan fragmentasi dimana keduanya sudah dijalankan dengan baik. Kegiatan pelaksanaan peraturan daerah No. 7 Tahun 2016 secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Fragmentasi dilakukan melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas Dinas Per-dagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai tangan panjang pemerintah daerah yang bertanggungjawab secara langsung dengan pedagang kaki lima serta melaksanakan sosialisai, penataan dan pemberdayaan.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam mengatasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut : a.Relokasi pedagang kaki lima b.Pedagang kaki lima di berikan gerobak c.Pemindahan pedagang kaki lima ke pasar tradisional d.Kondisi ekonomi dari sebagian masyarakat kota yang pas-pasan termasuk pedagang kaki lima mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur,

sehingga membuka peluang kerja bagi masyarakat marjinal untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan usaha padat karya, selain itu juga bagi pedagang kaki lima dengan modal yang terbatas diberikan pinjaman lunak melalui koperasi untuk mengembangkan usahanya e. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang terbatas di diharapkan pemerintah daerah menambah per-sonil pegawainya yang lebih berkualitas sehingga penanganan pedagang kaki lima akan lebih efektif lagi.

## **Penutup**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karanganyar di analisis dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dan Masmanian & Sabatier meliputi faktor komunikasi, kondisi ekonomi, sikap dan sumber daya. Variabel komunikasi mempunyai peranan penting di dalam program im-plementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Komunikasi yang ada antara dinas atau instansi yang terkait dengan program ini sangat baik. Semua pihak yang terkait dilibatkan dan selalu diajak untuk menentukan kebijakan yang diambil. Selalu terjadi komunikasi melalui per-temuan-pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Karang-anyar. Variabel sikap meliputi Para agen pelaksana yang sangat mendukung, sehingga sangat mem-bantu tercapainya tujuan dari program ini. Tetapi sebagian besar para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak menaati dan mematuhi peratruran daerah se-hingga pemerintah harus terus melakukan pengawasan dan pem-berian sanksi kepada pedagang kkaai lima yang masih berjualan di tempat-tempat yang terlarang. Faktor kondisi ekonomi karena program ini membutuhkan dana yang sangat besar. Program ini didukung oleh kemampuan ekonomi Kabupaten Karanganyar yang akhirnya mem-punyai dana yang cukup untuk melaksanakan program kebijakan penataan dan pemberdayaan pe-dagang kaki lima ini. Sedangkan variabel sumber daya juga sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini. Program

ini harus melibatkan banyak personil yang besar dengan kemampuan yang memadai sangat mendukung pe-laksanaan program implementasi kebijakan penataan dan pem-berdayaan pedagang kaki lima ini.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin.1997.*Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, Willian.1999. *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, RN. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Edi, Suharto.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Rafika Aditama.
- Edward III, George C (edited). 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England
- Gaffar, Affan. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Prisma
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Gunawan Sumodiningrat.1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*(Bina Rena Pariwara, 1990. Hlm. II)
- Hikmat, Herry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Mayarakat*. Jakarta : Citra Utama.

- Moeljarto, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. M. A. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : RemajaRosdakarya.
- Prijono dan Pranarka, 1996. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Rukminto, Isbandi. 2001. *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Sabatier, Paul. 1986. Top down and Bottom Up Approaches ti Implementation research” *Journal of public Policy* 6, (Jan), h. 21-48
- Siagaan. 1998. *Sosial Ekonomi Pedagang kaki Lima*. Jakarta : Gramedia
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yetty Sarjono. Pengantar Salladien. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: pendekatan kualitatif*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.